



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Jl. Raya Setu No. 89 Bekasi, 17520
Website : www.ptdisttd.ac.id
Email : ptdisttd@gmail.com
ptdi_sttd@yahoo.com

Telp. (021) 8254640
82608995
29091561

Fax. (021) 82608995
(021) 8254640
29091561

Nomor : UM.207/17/1/PTDI-STTD-2023 Bekasi, 21 September 2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Sosialisasi Program Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat disampaikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diwajibkan untuk menjalani masa prajabatan selama 1 (satu) tahun dan masa prajabatan hanya diikuti 1 (satu) kali kesempatan. Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD memiliki rencana program untuk pelatihan dasar CPNS bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir secara daring (*online*) pada Rapat Sosialisasi Program Pelatihan Dasar CPNS yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023
Pukul : 14.00 WIB s.d. Selesai
Media : *Zoom Meeting*
Meeting ID : 406 621 1655
Passcode : PTDISTTD

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur,



Ditandatangani secara elektronik
AHMAD YANI, ATD, MT

NIP. 196509301990031003

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat.

SUSUNAN ACARA KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PELATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	WAKTU	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	14.00 – 14.05	Pembukaan oleh MC	MC
2	14.05 – 14.10	Pembukaan kegiatan sosialisasi	Direktur PTDI-STTD
3	14.10 – 14.40	Paparan dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	Pusbang Aparatur
4	14.40-15.10	Tanya Jawab	Seluruh Peserta
5	15.10-selesai	Penutupan	MC

DAFTAR UNDANGAN SOSIALISASI

Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat;
17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat;
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara;
21. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
22. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya;
23. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat;
24. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya;
25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil;
26. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang;
27. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah;
28. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur;
29. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Agam;
30. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan;
31. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat;
32. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung;
33. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan;
34. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai;
35. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar;
36. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara;
37. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng;
38. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang;
39. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara;
40. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi;

41. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;
42. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis;
43. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang;
44. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan;
45. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah;
46. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bieruen;
47. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bima;
48. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Binjai;
49. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;
50. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar;
51. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boalemo;
52. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor;
53. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana;
54. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango;
55. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali;
56. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
57. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba;
58. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan;
59. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo;
60. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buol;
61. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton;
62. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
63. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;
64. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
65. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
66. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya;
67. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala;
68. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang;
69. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang;
70. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak;
71. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues;
72. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar;
73. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara;
74. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo;
75. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan;
76. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul;
77. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
78. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
79. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir;
80. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu;
81. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;
82. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
83. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang;
84. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar;
85. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu;
86. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem;

87. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
88. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo;
89. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
90. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara;
91. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang;
92. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti;
93. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
94. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
95. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara;
96. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru;
97. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat;
98. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
99. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus;
100. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan;
101. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
102. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
103. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
104. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
105. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu;
106. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat;
107. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;
108. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan;
109. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
110. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah;
111. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur;
112. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara;
113. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Landak;
114. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebong;
115. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata;
116. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
117. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah;
118. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun;
119. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
120. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau;
121. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mempawah;
122. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke;
123. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji;
124. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan;
125. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa;
126. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim;
127. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Barat;
128. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muna;
129. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;
130. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Utara;
131. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas;
132. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya;

133. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nagekeo;
134. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada;
135. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
136. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan;
137. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Utara;
138. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan;
139. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
140. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
141. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
142. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas;
143. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman;
144. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat;
145. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong;
146. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat;
147. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman;
148. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasangkayu;
149. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;
150. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;
151. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati;
152. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan;
153. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang;
154. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara;
155. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
156. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran;
157. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat;
158. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
159. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya;
160. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato;
161. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
162. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu;
163. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo;
164. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
165. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir;
166. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu;
167. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas;
168. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
169. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
170. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau;
171. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun;
172. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
173. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;
174. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak;
175. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi;
176. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung;
177. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka;
178. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun;

179. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue;
180. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai;
181. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
182. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman;
183. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan;
184. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok;
185. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen;
186. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;
187. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi;
188. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara;
189. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
190. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat;
191. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat;
192. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong;
193. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan;
194. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung;
195. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar;
196. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
197. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang;
198. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus;
199. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
200. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan;
201. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
202. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin;
203. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya;
204. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung;
205. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban;
206. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
207. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
208. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung;
209. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan;
210. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
211. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
212. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
213. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan;
214. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh;
215. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
216. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
217. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
218. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
219. Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau;
220. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
221. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu;
222. Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar;
223. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor;
224. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi;

225. Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai;
226. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo;
227. Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa;
228. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau;
229. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun;
230. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang;
231. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang;
232. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan;
233. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro;
234. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto;
235. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
236. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan;
237. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang;
238. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
239. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang;
240. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu;
241. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare;
242. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman;
243. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan;
244. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
245. Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih;
246. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo;
247. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang;
248. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga;
249. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto;
250. Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang;
251. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok;
252. Kepala Dinas Perhubungan Kota Subulussalam;
253. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi;
254. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh;
255. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta;
256. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan;
257. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang;
258. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
259. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi;
260. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate;
261. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan;
262. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tomohon;
263. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual;

DAFTAR UNDANGAN SOSIALISASI

Kepada Yth:

1. Kepala BKPSDM Provinsi Aceh;
2. Kepala BKPSDM Provinsi Bali;
3. Kepala BKPSDM Provinsi Bangka Belitung;
4. Kepala BKPSDM Provinsi Bengkulu;
5. Kepala BKPSDM Provinsi Gorontalo;
6. Kepala BKPSDM Provinsi Jambi;
7. Kepala BKPSDM Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala BKPSDM Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala BKPSDM Provinsi Kalimantan Barat;
10. Kepala BKPSDM Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Kepala BKPSDM Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala BKPSDM Provinsi Kalimantan Utara;
13. Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau;
14. Kepala BKPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Kepala BKPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Kepala BKPSDM Provinsi Papua Barat;
17. Kepala BKPSDM Provinsi Riau;
18. Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat;
19. Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Utara;
21. Kepala BKPSDM Provinsi Sumatera Barat;
22. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya;
23. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Barat;
24. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Jaya;
25. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil;
26. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang;
27. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah;
28. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Timur;
29. Kepala BKPSDM Kabupaten Agam;
30. Kepala BKPSDM Kabupaten Balangan;
31. Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Barat;
32. Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung;
33. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan;
34. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai;
35. Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar;
36. Kepala BKPSDM Kabupaten Banjarnegara;
37. Kepala BKPSDM Kabupaten Bantaeng;
38. Kepala BKPSDM Kabupaten Batang;
39. Kepala BKPSDM Kabupaten Batu Bara;
40. Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi;

41. Kepala BKPSDM Kabupaten Bener Meriah;
42. Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkalis;
43. Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkayang;
44. Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Selatan;
45. Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah;
46. Kepala BKPSDM Kabupaten Bieruen;
47. Kepala BKPSDM Kabupaten Bima;
48. Kepala BKPSDM Kabupaten Binjai;
49. Kepala BKPSDM Kabupaten Bintan;
50. Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar;
51. Kepala BKPSDM Kabupaten Boalemo;
52. Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor;
53. Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana;
54. Kepala BKPSDM Kabupaten Bone Bolango;
55. Kepala BKPSDM Kabupaten Boyolali;
56. Kepala BKPSDM Kabupaten Brebes;
57. Kepala BKPSDM Kabupaten Bulukumba;
58. Kepala BKPSDM Kabupaten Bulungan;
59. Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo;
60. Kepala BKPSDM Kabupaten Buol;
61. Kepala BKPSDM Kabupaten Buton;
62. Kepala BKPSDM Kabupaten Ciamis;
63. Kepala BKPSDM Kabupaten Cianjur;
64. Kepala BKPSDM Kabupaten Cilacap;
65. Kepala BKPSDM Kabupaten Dairi;
66. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya;
67. Kepala BKPSDM Kabupaten Donggala;
68. Kepala BKPSDM Kabupaten Empat Lawang;
69. Kepala BKPSDM Kabupaten Enrekang;
70. Kepala BKPSDM Kabupaten Fakfak;
71. Kepala BKPSDM Kabupaten Gayo Lues;
72. Kepala BKPSDM Kabupaten Gianyar;
73. Kepala BKPSDM Kabupaten Gorontalo Utara;
74. Kepala BKPSDM Kabupaten Gorontalo;
75. Kepala BKPSDM Kabupaten Grobogan;
76. Kepala BKPSDM Kabupaten Gunung Kidul;
77. Kepala BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
78. Kepala BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
79. Kepala BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir;
80. Kepala BKPSDM Kabupaten Indragiri Hulu;
81. Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu;
82. Kepala BKPSDM Kabupaten Jember;
83. Kepala BKPSDM Kabupaten Jombang;
84. Kepala BKPSDM Kabupaten Kampar;
85. Kepala BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu;
86. Kepala BKPSDM Kabupaten Karangasem;

87. Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang;
88. Kepala BKPSDM Kabupaten Karo;
89. Kepala BKPSDM Kabupaten Kaur;
90. Kepala BKPSDM Kabupaten Kayong Utara;
91. Kepala BKPSDM Kabupaten Kepahiang;
92. Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti;
93. Kepala BKPSDM Kabupaten Klaten;
94. Kepala BKPSDM Kabupaten Klungkung;
95. Kepala BKPSDM Kabupaten Kolaka Utara;
96. Kepala BKPSDM Kabupaten Kotabaru;
97. Kepala BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Barat;
98. Kepala BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur;
99. Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus;
100. Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan;
101. Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang;
102. Kepala BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
103. Kepala BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
104. Kepala BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu Utara;
105. Kepala BKPSDM Kabupaten Labuhanbatu;
106. Kepala BKPSDM Kabupaten Lahat;
107. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau;
108. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamongan;
109. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Selatan;
110. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah;
111. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Timur;
112. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Utara;
113. Kepala BKPSDM Kabupaten Landak;
114. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong;
115. Kepala BKPSDM Kabupaten Lembata;
116. Kepala BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota;
117. Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah;
118. Kepala BKPSDM Kabupaten Madiun;
119. Kepala BKPSDM Kabupaten Magetan;
120. Kepala BKPSDM Kabupaten Malinau;
121. Kepala BKPSDM Kabupaten Mempawah;
122. Kepala BKPSDM Kabupaten Merauke;
123. Kepala BKPSDM Kabupaten Mesuji;
124. Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa Selatan;
125. Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa;
126. Kepala BKPSDM Kabupaten Muara Enim;
127. Kepala BKPSDM Kabupaten Muna Barat;
128. Kepala BKPSDM Kabupaten Muna;
129. Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin;
130. Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara;
131. Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas;
132. Kepala BKPSDM Kabupaten Nagan Raya;

133. Kepala BKPSDM Kabupaten Nagekeo;
134. Kepala BKPSDM Kabupaten Ngada;
135. Kepala BKPSDM Kabupaten Nganjuk;
136. Kepala BKPSDM Kabupaten Nias Selatan;
137. Kepala BKPSDM Kabupaten Nias Utara;
138. Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan;
139. Kepala BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
140. Kepala BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
141. Kepala BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Ulu;
142. Kepala BKPSDM Kabupaten Padang Lawas;
143. Kepala BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman;
144. Kepala BKPSDM Kabupaten Pakpak Bharat;
145. Kepala BKPSDM Kabupaten Parigi Moutong;
146. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat;
147. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasaman;
148. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasangkayu;
149. Kepala BKPSDM Kabupaten Paser;
150. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan;
151. Kepala BKPSDM Kabupaten Pati;
152. Kepala BKPSDM Kabupaten Pekalongan;
153. Kepala BKPSDM Kabupaten Pematang;
154. Kepala BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara;
155. Kepala BKPSDM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
156. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesawaran;
157. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Barat;
158. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan;
159. Kepala BKPSDM Kabupaten Pidie Jaya;
160. Kepala BKPSDM Kabupaten Pohuwato;
161. Kepala BKPSDM Kabupaten Ponorogo;
162. Kepala BKPSDM Kabupaten Pringsewu;
163. Kepala BKPSDM Kabupaten Probolinggo;
164. Kepala BKPSDM Kabupaten Rembang;
165. Kepala BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir;
166. Kepala BKPSDM Kabupaten Rokan Hulu;
167. Kepala BKPSDM Kabupaten Sambas;
168. Kepala BKPSDM Kabupaten Samosir;
169. Kepala BKPSDM Kabupaten Sampang;
170. Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau;
171. Kepala BKPSDM Kabupaten Sarolangun;
172. Kepala BKPSDM Kabupaten Semarang;
173. Kepala BKPSDM Kabupaten Seruyan;
174. Kepala BKPSDM Kabupaten Siak;
175. Kepala BKPSDM Kabupaten Sigi;
176. Kepala BKPSDM Kabupaten Sijunjung;
177. Kepala BKPSDM Kabupaten Sikka;
178. Kepala BKPSDM Kabupaten Simalungun;

179. Kepala BKPSDM Kabupaten Simeulue;
180. Kepala BKPSDM Kabupaten Sinjai;
181. Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang;
182. Kepala BKPSDM Kabupaten Sleman;
183. Kepala BKPSDM Kabupaten Solok Selatan;
184. Kepala BKPSDM Kabupaten Solok;
185. Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen;
186. Kepala BKPSDM Kabupaten Subang;
187. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
188. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukamara;
189. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukoharjo;
190. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumba Barat;
191. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat;
192. Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong;
193. Kepala BKPSDM Kabupaten Tabanan;
194. Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Tidung;
195. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Datar;
196. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut;
197. Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang;
198. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanggamus;
199. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
200. Kepala BKPSDM Kabupaten Tapanuli Selatan;
201. Kepala BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara;
202. Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin;
203. Kepala BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya;
204. Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung;
205. Kepala BKPSDM Kabupaten Tuban;
206. Kepala BKPSDM Kabupaten Tulang Bawang Barat;
207. Kepala BKPSDM Kabupaten Tulang Bawang;
208. Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung;
209. Kepala BKPSDM Kabupaten Way Kanan;
210. Kepala BKPSDM Kabupaten Wonogiri;
211. Kepala BKPSDM Kabupaten Wonosobo;
212. Kepala BKPSDM Kota Ambon;
213. Kepala BKPSDM Kota Balikpapan;
214. Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh;
215. Kepala BKPSDM Kota Bandar Lampung.
216. Kepala BKPSDM Kota Bandung;
217. Kepala BKPSDM Kota Banjarbaru;
218. Kepala BKPSDM Kota Banjarmasin;
219. Kepala BKPSDM Kota Baubau;
220. Kepala BKPSDM Kota Bekasi;
221. Kepala BKPSDM Kota Bengkulu;
222. Kepala BKPSDM Kota Blitar;
223. Kepala BKPSDM Kota Bogor;
224. Kepala BKPSDM Kota Bukittinggi;

225. Kepala BKPSDM Kota Dumai;
226. Kepala BKPSDM Kota Gorontalo;
227. Kepala BKPSDM Kota Langsa;
228. Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau;
229. Kepala BKPSDM Kota Madiun;
230. Kepala BKPSDM Kota Magelang;
231. Kepala BKPSDM Kota Malang;
232. Kepala BKPSDM Kota Medan;
233. Kepala BKPSDM Kota Metro;
234. Kepala BKPSDM Kota Mojokerto;
235. Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang;
236. Kepala BKPSDM Kota Padang Sidempuan;
237. Kepala BKPSDM Kota Padang;
238. Kepala BKPSDM Kota Pagar Alam;
239. Kepala BKPSDM Kota Palembang;
240. Kepala BKPSDM Kota Palu;
241. Kepala BKPSDM Kota Parepare;
242. Kepala BKPSDM Kota Pariaman;
243. Kepala BKPSDM Kota Pekalongan;
244. Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru;
245. Kepala BKPSDM Kota Prabumulih;
246. Kepala BKPSDM Kota Probolinggo;
247. Kepala BKPSDM Kota Sabang;
248. Kepala BKPSDM Kota Salatiga;
249. Kepala BKPSDM Kota Sawahlunto;
250. Kepala BKPSDM Kota Singkawang;
251. Kepala BKPSDM Kota Solok;
252. Kepala BKPSDM Kota Subulussalam;
253. Kepala BKPSDM Kota Sukabumi;
254. Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh;
255. Kepala BKPSDM Kota Surakarta;
256. Kepala BKPSDM Kota Tangerang Selatan;
257. Kepala BKPSDM Kota Tangerang;
258. Kepala BKPSDM Kota Tanjungbalai;
259. Kepala BKPSDM Kota Tebing Tinggi;
260. Kepala BKPSDM Kota Ternate;
261. Kepala BKPSDM Kota Tidore Kepulauan;
262. Kepala BKPSDM Kota Tomohon;
263. Kepala BKPSDM Kota Tual;